

## ISLAMISASI MASYARAKAT TIONGHOA SURABAYA MASA ORDE BARU

**M. MUWAFIQ ZAMRONI**

Program Studi Pendidikan Sejarah,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email : [Izamzamroni@gmail.com](mailto:Izamzamroni@gmail.com)

**Sri Mastuti Purwaningsih**

S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Etnis Tionghoa merupakan etnis minoritas di Indonesia, sebagai etnis minoritas mereka harus bisa berbaur dengan masyarakat pribumi yang merupakan mayoritas di Indonesia. Hal ini menimbulkan berbagai diskriminasi yang terjadi terhadap etnis Tionghoa. Salah satu cara mengatasi diskriminasi adalah melalui asimilasi melalui Islamisasi.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah (1) Bagaimana tokoh – tokoh Islamisasi Tionghoa masa Orde Baru di Surabaya (2) Bagaimana wadah dan upaya yang dilakukan agar Islamisasi masyarakat Tionghoa masa Orde Baru di Surabaya. (3) bagaimana dampak Islamisasi Tionghoa masa Orde Baru di Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat tokoh – tokoh Tionghoa yang mencetuskan dan mendukung Islamisasi masyarakat Tionghoa salah satunya adalah H. Abdul Karim Oey kemudian ada Junus Yahya. Selain itu, ada juga Bambang Sujanto dan Ust. Syaukani Ong yang merupakan orang – orang pendiri PITI Surabaya.

Dalam proses Islamisasi yang dilakukan terdapat wadah yang menjadi pendukung dilakukannya Islamisasi seperti PITI, Yayasan Pembauran, Yayasan H. Karim Oey dengan cara bersilaturohmi di orang – orang Tionghoa yang non muslim, selain itu juga dengan mempertemukan orang – orang Tionghoa Muslim dan non Muslim di hari raya.

Proses Islamisasi yang dilakukan terhadap masyarakat Tionghoa mengalami juga mengalami berbagai masalah dan hambatan mulai dari ekonomi, psikologi serta fisik. Namun berbagai masalah tersebut tidak menjadi penghalang terhadap dakwah di kalangan masyarakat Tionghoa. Islamisasi dilakukan dengan tujuan agar mereka menjadi seorang muslim yang kemudian menjadi identitas mereka sehingga identitas mereka menjadi Muslim Tionghoa.

**Kata Kunci:** Tionghoa, Orde Baru, Islamisasi, PITI.

### Abstract

*Chinese ethnicity is an ethnic minority in Indonesia, as an ethnic minority they must be able to mingle with the indigenous people who constitute the majority in Indonesia. This has led to various discrimination that occurred against the ethnic Chinese. One way to deal with discrimination is through assimilation through Islamization.*

*The formulation of the problem in the study was (1) How were the figures of Chinese Islamization during the New Order in Surabaya (2) How was the container and efforts made to Islamize the Chinese community during the New Order in Surabaya. (3) how the impact of Islamization of China in the New Order era in Surabaya. The method used is the historical research method of Heuristics, Criticism, Interpretation, and Historiography.*

*The results of this study explain that there are Chinese characters who sparked and supported the Islamization of the Chinese community one of which was H. Abdul Karim Oey and then there was Junus Yahya. In addition, there are also Bambang Sujanto and Ust. Syaukani Ong who is a person - the founder of PITI Surabaya.*

*In the process of Islamization carried out there was a place that became a supporter of Islamization such as PITI, the Pembauran Foundation, H. Karim Oey Foundation by collaborating with non-Muslim Chinese, besides meeting Chinese and non-Muslim people in the day highway.*

*The process of Islamization carried out on Chinese society also experienced various problems and obstacles starting from the economy, psychology and physical. But these various problems did not become a barrier to da'wah in the Chinese community. Islamization was carried out with the aim that they become a Muslim who later became their identity so that their identity became Chinese Muslims.*

**Keywords:** Chinese, New Order, Islamization, PITI.

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan berbagai budaya dan etnis yang beragam. Keberagaman itu membuat Indonesia menjadi negara yang menarik, dimana setiap wilayah memiliki bahasa, adat istiadat dan kebudayaan. Memiliki keberagaman bukan saja membuat Indonesia menjadi negara yang indah tapi juga dapat

membuat adanya diskriminasi terhadap pihak – pihak yang menjadi minoritas. Di Indonesia sendiri tindakan diskriminasi biasanya dikarenakan kecemburuan sosial yang kemudian menjadi sebuah tindakan anarki yang mengarah ke arah kekerasan sehingga menjadi sebuah konflik.

Tionghoa sebagai etnis yang memiliki perbedaan terhadap pribumi dari segi agama dan kebudayaan

berdampak pada pembauran yang terjadi antara masyarakat Tionghoa dengan pribumi membutuhkan perjuangan yang panjang. Selain diskriminasi, mereka juga sering mengalami kekerasan akibat konflik. Hanya terjadi di negara Indonesia, setiap kali ada masalah yang selalu disalahkan adalah etnis Tionghoa, mereka akan dikejar – kejar, dilukai, bahkan dibunuh sehingga tidak jarang mereka akan melakukan eksodus pelarian negara – negara lain supaya mereka bisa aman.<sup>1</sup>

Perbedaan kebudayaan dan agama yang terjadi membuat pemerintah menerapkan suatu kebijakan yang bertujuan untuk membaurkan etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan dan menjadi kebijakan yang pro-kontra dikalangan etnis Tionghoa adalah kebijakan asimilasi yang digagas oleh pemerintah Orde Baru. Kebijakan asimilasi adalah sebuah kebijakan yang belum pernah diterapkan oleh pemerintahan Orde Lama. Sebelumnya pemerintahan Orde lama melakukan suatu kebijakan yakni kebijakan integrasi terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia.<sup>2</sup> Banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini merupakan suatu bentuk diskriminasi pemerintahan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa. Sementara pemerintah Orde Baru menilai bahwa dengan melakukan asimilasi akan mempercepat proses pembauran etnis Tionghoa di Indonesia sehingga hal tersebut akan membuat etnis Tionghoa lebih menghargai dan mencintai Indonesia.

Kebijakan asimilasi sendiri pada dasarnya memaksa etnis Tionghoa meninggalkan segala bentuk kebudayaan dan agama leluhur yang sudah menjadi kebiasaannya. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sulit bagi etnis Tionghoa, dimana kebudayaan dan agama leluhur adalah sesuatu yang harus dijaga. Upaya pembauran yang dilakukan oleh pemerintah mendapat dukungan oleh beberapa tokoh Tionghoa, mereka melakukan berbagai cara untuk menyukseskan proses pembauran salah satunya melalui agama. Para tokoh Tionghoa menganjurkan masyarakat Tionghoa memeluk agama Islam karena menurut mereka masuk Islam merupakan jalan keluar bagi masalah Tionghoa di Indonesia.<sup>3</sup>

Dari latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian terhadap Islamisasi masyarakat Tionghoa masa Orde Baru di Surabaya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori identitas. Dalam pemilihan teori identitas pada skripsi saya, saya menggunakan teori identitas Jacson dan Smith. Menurut Jackson dan Smith ada empat dimensi dalam mengkonseptualisasikan identitas sosial yang pertama persepsi dalam konteks antar kelompok, yang kedua daya tarik in group, yang ketiga keyakinan salin terkait, serta yang keempat

depersonalisasi. Penjelasan mengenai teori tersebut akan dilakukan pada bab tiga dan empat.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan sebuah penelitian sejarah. Sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang dalam hal ini memiliki beberapa tahapan mulai dari heuristic, kritik, interpretasi hingga historiografi.

Berikut 4 tahap metode penelitian sejarah yang dilakukan peneliti:

### 1. Heuristik

Heuristik sendiri merupakan suatu proses mencari dan menemukan sumber – sumber yang diperlukan.<sup>5</sup> pada tahap ini peneliti mencari sebanyak – banyaknya sumber – sumber yang dibutuhkan mulia dari sumber primer sampai sumber sekunder mengenai penelitian yang dibahas. Sumber primer yang dibutuhkan oleh peneliti adalah Koran – Koran sezaman mengenai asimilasi Tionghoa di Surabaya. Selain itu sumber lain yang dibutuhkan adalah wawancara dengan orang – orang yang terlibat dalam pembahasan peneliti dalam hal ini yakni masyarakat Tionghoa Surabaya yang menjadi muslim di sekitar tahun 1967 – 1998. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku – buku yang membahas mengenai topik yang diteliti.

### 2. Kritik Sumber

Tahapan kedua yaitu kritik intern yang digunakan untuk menguji sumber – sumber yang dilakukan sebagai langka penyelidikan masa lampau.<sup>6</sup> Pada tahap ini peneliti melakukan penilaian terhadap sumber – sumber sejarah yang telah diperoleh yang kemudian dilakukan verifikasi dalam kritik sejarah. Kritik sejarah digunakan menggunakan kritik intern yang menitik beratkan pada kebenaran isi sumber sehingga bisa dijadikan fakta.

### 3. Interpretasi

Tahap ketiga yaitu interpretasi yang merupakan proses pengolahan data yang diperoleh penulis dalam melakukan seleksi terhadap data dengan mencari hubungan antar fakta yang ditemukan.<sup>7</sup> Pada tahap ini peneliti akan melakukan interpretasi dengan cara membandingkan fakta – fakta yang telah ditemukan mengenai masalah yang peneliti bahas sehingga akan menghasilkan kesimpulan mengenai fakta – fakta tersebut.

### 4. Historiografi

Tahap keempat yaitu historiografi merupakan suatu tahap untuk menyampaikan hasil yang diperoleh serta telaah melalui proses penyusunan sesuai kronologi yang kemudian disampaikan dan disajikan dalam bentuk tulisan yang dapat

<sup>1</sup> Priyanto Wibowo." *TIONGHOA DALAM KEBERAGAMAN INDONESIA: SEBUAH PERSPEKTIF HISTORIS TENTANG POSISI DAN IDENTITAS* "Prosiding the 4<sup>th</sup> Internasional Conference of Indonesia Studies : "Unity, Defersity, and Future" Hal. 644

<sup>2</sup> Leo Suryadinata.2003. *Jurnal UI.ac.id." Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?*

<sup>3</sup> Ibid. 2005. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900 – 2002*. Jakarta: LP3ES Hlm : 249.

<sup>4</sup> [http://etheses.uin-malang.ac.id/2620/5/09410051\\_Bab\\_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/2620/5/09410051_Bab_2.pdf)

<sup>5</sup> Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press. Hlm 10

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid. Hlm 11

dipertanggung jawabkan secara konseptual teoritis dan metodologis menurut ilmu sejarah.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. GAMBARAN UMUM KOTA SURABAYA

#### 1. Geografis Surabaya

Kota Surabaya merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Timur yang sekarang telah menjelma menjadi salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia. Secara geografis kota Surabaya, terletak di  $9^{\circ} - 7^{\circ} 7'$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ} 36' - 112^{\circ} 57'$  Bujur Timur. Kota Surabaya memiliki luas 52.087 Ha yang terdiri dari 33.048 Ha luas daratan dan sisanya 19.039 merupakan wilayah lautan.

Kota ini berbatasan langsung dengan Selat Madura di bagian utara dan Timur, kota Sidoarjo di bagian selatan dan Kota Gresik di Bagian barat. Kota Surabaya terbagi menjadi lima wilayah daerah kerja pembantu yang pertama adalah wilayah Surabaya pusat, wilayah ini meliputi kecamatan Tegalsari, Simokerto, Genteng dan Bubutan. Kemudian wilayah kedua adalah Surabaya timur yang meliputi kecamatan Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, dan Tenggiling Mejoyo. Wilayah ketiga yakni Surabaya barat terdiri dari kecamatan Benowo, Pakal, Asem Rowo, Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep, dan Lakarsantri. Di wilayah keempat Surabaya Utara Wilayah ini terdiri dari kecamatan Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean, Cantikan, dan Krembangan. Dan yang terakhir kelima yaitu wilayah Surabaya Selatan, Wilayah ini terdiri dari kecamatan Wonokromo, Wonocolo, Wiyung, Karang, Pilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh Pakis, dan Sawahan.

#### 2. Sejarah Singkat Surabaya

Surabaya merupakan salah satu kota tertua di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan melalui prasasti Trowulan 1 tahun saka 1280 (1358) sebagai nama desa yang berada di tepi aliran sungai, jauh sebelum kedatangan orang-orang eropa di Indonesia.<sup>9</sup> Dalam Kitab *Negarakeragama*, Pupuh XVII/5 diceritakan bahwa nama Surabaya sudah ada pada masa kerajaan Majapahit yang pada saat itu dipimpin oleh raja Hayam Wuruk. Pada Kitab itu diceritakan bahwa Surabaya merupakan tempat penyeberangan perahu-perahu kecil yang akan menuju ke Buwun. Di masa klasik Surabaya menjelma menjadi kota besar dengan pelabuhan di bagian utaranya yakni pelabuhan Kali Mas yang saat itu menjadi pelabuhan yang sangat penting bagi Surabaya sebelum adanya pelabuhan Tanjung Perak.

Pemerintah VOC pertama kali menginjakkan kaki di Surabaya pada tahun 1617, hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya kantor dagang dan sebuah loji (*loge*). Memasuki abad ke- 18 pemerintah kolonial membangun Kota Bawah atau “Beneden Sted” yang merupakan kawasan kota lama di Surabaya. Pada masa kolonial Belanda tepatnya di abad ke-19, Surabaya diposisikan

sebagai pelabuhan utama yang berperan sebagai *collecting center* dalam rangkaian terakhir pengumpulan hasil perkebunan daerah-daerah di ujung timur pulau Jawa.

Surabaya di awal abad ke-20 telah memperlihatkan dirinya sebagai kota yang bercirikan metropolitan namun tetap mencerminkan sebuah kota yang agraris. Sebagian masyarakatnya, terutama masyarakat Eropa sudah tinggal di tempat pemukiman – pemukiman yang elit real estat. Sementara masyarakat Bumiputra masih tinggal di pemukiman – pemukiman khas pedesaan Jawa. Memasuki masa pendudukan Jepang, Surabaya menjadi pusat perdagangan di Indonesia dan salah satu yang terbesar terletak di Jalan Kembang Jepun yang menjadi barometer perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur.

#### 3. Penduduk di Surabaya

Sebagian besar penduduk Surabaya adalah penduduk Jawa Timur, karena kota ini masih berada di lingkungan Jawa yang kuat. Namun kebudayaan Jawa sendiri ada bermacam – macam dan masing – masing memiliki ciri khas tersendiri. Masyarakat Jawa Timur biasanya dikenal sebagai orang Jawa yang memiliki sikap yang lebih terbuka, tempramen lebih hangat, dan kehidupan sosial yang lebih kerakyatan, sehingga mereka dikenal sebagai masyarakat Jawa Timuran.<sup>10</sup>

### B. MASYARAKAT TIONGHOA SURABAYA MASA ORDE LAMA

Masa pemerintahan Orde Lama dimulai semenjak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Masa ini merupakan sebutan ketika Ir. Soekarno menjabat sebagai presiden Indonesia. Pada masa Orde Lama terbagi menjadi dua periode yang dikenal dengan Periode Demokrasi Liberal antara tahun 1949 -1958 dan Periode Demokrasi Terpimpin antara tahun 1959 -1965.

#### 1) Periode Demokrasi Liberal (1949 -1965)

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945 namun pengakuan kedaulatan Belanda baru didapatkan pada tahun 1949 dengan ditandatanganinya perjanjian Konferensi Meja Bundar. Pengakuan kedaulatan yang didapat Indonesia menandai dimulainya proses Indonesianisasi kepemimpinan dan sektor – sektor lainnya seperti pertanian, perdagangan, pabrik, sarana – prasarana, keuangan hingga produksi tambang. Sasaran utama dari proses Indonesianisasi merupakan warga Belanda yang kemudian berlanjut pada Orang – orang Tionghoa lokal yang juga menemui nasib yang sama yakni menghadapi proses Indonesianisasi.<sup>11</sup>

Tindakan diskriminatif pertama yang dilakukan dalam proses Indonesianisasi yang dilakukan terhadap orang asing dan Tionghoa lokal pada khususnya yakni sebuah sistem yang diterapkan dalam perekonomian yang sering dikenal dengan sebutan sistem ekonomi benteng. Sistem ini mulai diperkenalkan pada tahun 1950, setelah berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS). Sistem Benteng merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh

<sup>8</sup> *Ibid*.

<sup>9</sup> Andjarwati Noordjanah. 2004. “KOMUNITAS TIONGHOA DI SURABAYA (1900-1946)”, Semarang : Mesiass, hlm 7.

<sup>10</sup> *Ibid* 71

<sup>11</sup> Leo Suryadinata. 1982. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: PT. Grafiti Press. Hlm 135

pemerintah dengan tujuan mendorong perkembangan wiraswastawan nasional yang dimulai dari mengatasi masalah importir barang dan berlanjut ke usaha – usaha lainnya.

Berdasarkan sejarah Indonesia, Sistem Benteng dikenal sebagai suatu strategi yang digunakan untuk merebut kembali daerah yang hilang akibat diduduki oleh musuh yang kuat.

Berbagai bentuk protes yang dilancarkan kaum minoritas Tionghoa ditambah kegagalan sistem benteng itu sendiri membuat sistem ini dihentikan pada tahun 1954. Kegagalan sistem benteng disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurang berpengalaman masyarakat Indonesia, kuatnya oposisi masyarakat Tionghoa, dan berlangsungnya inflasi secara terus-menerus.

Sistem benteng yang diterapkan pemerintah ternyata melahirkan suatu sistem baru yang dikenal dengan sistem Ali Baba. Sistem ini merupakan bentuk kerjasama antara orang pribumi dengan orang Tionghoa dimana orang Indonesia sebagai pemilik usaha sementara orang Tionghoa sebagai penyelenggara usaha. Dalam pelaksanaannya sistem ini dianggap tidak adil dan merugikan orang Indonesia karena laba yang diterima orang Tionghoa lebih besar dibanding dengan laba yang diterima orang Indonesia selain itu orang Indonesia juga tidak mendapatkan pengalaman berusaha.

## 2) Periode Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)

Pada tahun 1957 demokrasi liberal yang berlangsung di Indonesia mulai mengalami kemunduran yang kemudian digantikan dengan demokrasi terpimpin tahun 1959. Pada tanggal 16 November 1959 kabinet Indonesia mengundangkan peraturan yang disebut sebagai Peraturan Presiden No 10 yang kembali menegaskan mengenai larangan tersebut. Peraturan memberikan batasan kepada pedagang eceran untuk mencari keuntungan dari pembelian dan penjualan tanpa mengadakan perubahan teknis pada barang itu.<sup>12</sup> Selain itu, Tionghoa juga dilarang melakukan usaha dalam bidang perdagangan eceran dan wajib mengalihkan perusahaannya menjadi milik Negara Indonesia sebelum 1 Januari 1960.

Peraturan tersebut menuai berbagai prokontra dikalangan orang – orang Tionghoa. Banyak orang Tionghoa yang tidak mau menutup tokonya karena hanya sedikit orang Indonesia yang mempunyai modal yang cukup untuk mengambil alih usaha mereka. Orang – orang Tionghoa tersebut mendapatkan dukungan dari para pejabat kedutaan RRC yang meminta mereka melanjutkan usaha mereka.

Peraturan Presiden No 10 yang diterapkan oleh pemerintah membawa dampak negative terhadap hubungan antara Indonesia dan RRC serta orang – orang Tionghoa di Indonesia. Akibat dari peraturan ini berampak semakin besar, pemerintah Indonesia melakukan pemulangan terhadap orang Tionghoa lokal. Catatan Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Kehakiman memperkirakan bahwa dalam tahun 1960 ada

sekitar 102.196 orang Cina yang mayoritas merupakan Cina totok meninggalkan Indonesia dengan tujuan sebagian besar mereka menuju ke Cina.

bukan berarti tindakan anti asing telah dihentikan. Pada tahun 1960 muncul peraturan agrarian yang melarang orang asing memiliki tanah namun, peraturan tersebut tidak berdampak besar terhadap orang Tionghoa karena tidak banyak orang Tionghoa yang tertarik mempunyai tanah pertanian.

## C. MASYARAKAT TIONGHOA SURABAYA MASA ORDE BARU

### 1. Masyarakat Tionghoa Surabaya Masa Orde Baru

Masa Pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1968 sebagai dampak dari kejadian G30SPKI di tahun 1965. Pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh presiden Soeharto yang menggantikan presiden Soekarno pada masa pemerintahan Orde Lama.

Pemerintahan Orde Baru sering disebut sebagai pemerintahan yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa. Pada masa tersebut, pemerintahan Orde Baru mencoba untuk menghilangkan identitas masyarakat Tionghoa dan membatasi ruang gerak mereka dalam hal berpolitik ataupun bertradisi. Bagi etnis Tionghoa masa ini merupakan masa yang krusial dengan banyak sekali tindakan rasisme terhadap mereka. Di berbagai daerah tidak terkecuali di Surabaya terjadi pelanggaran terhadap etnis Tionghoa ditambah lagi adanya peraturan – peraturan yang dibuat berbau rasisme. Mulai dari peraturan penggantian nama dari Tionghoa ke Indonesia dimana orang Tionghoa yang namanya masih menggunakan nama Tionghoa diminta menggantinya dengan nama yang lebih Indonesia.

### 2. Kebijakan – Kebijakan Pemerintah Orde Baru terhadap masyarakat Tionghoa Surabaya

Sikap keras yang dilakukan pemerintah Orde Baru terhadap masyarakat Tionghoa juga berpengaruh terhadap keijakan yang diterapkan selama masa tersebut. Terbukti ada banyak kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat Tionghoa, Salah satunya adalah kebijakan pembauran atau asimilasi terhadap masyarakat Tionghoa.

Konsepsi pembauran yang dilakukan pemerintah Orde Baru khususnya terhadap masyarakat Tionghoa memang sudah lama direncanakan . terbukti ada berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah orde baru dalam melaksanakan konsepsi pembauran sebagai bentuk pengintegrasikan bangsa Indonesia. Bentuk kebijakan – kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam konsepsi pembauran antara lain :

#### a. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966

Keputusan ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melakukan proses asimilasi atau pembauran terhadap masyarakat Tionghoa. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1967 ini menjelaskan mengenai beberapa hal, yang pertama tentang proses asimilasi terhadap keturunan asing di Indonesia harus dipercepat dalam rangka nation dan character building Indonesia. Kemudian yang kedua

<sup>12</sup>Ibid.

penggantian nama orang – orang keturunan asing menjadi nama Indonesia asli akan mendorong usaha asimilasi yang menjadi program pemerintah. Terakhir bagi masyarakat Indonesia yang masih memakai nama Cina yang ingin mengubah namanya menjadi nama Indonesia akan diberikan fasilitas yang seluas – luasnya dengan melalui prosedur khusus.

- b. Instruksi Presiden No.14/1967 mengenai Agama, Kepercayaan, dan Adat istiadat Masyarakat Cina di Indonesia

Peraturan ini merupakan peraturan yang bertujuan untuk membaurkan atau melakukan asimilasi total terhadap masyarakat Tionghoa. Isi dari Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 yakni pelaksanaan ibadah bagi orang – orang Tionghoa yang memiliki aspek afinitas kultur pada negeri leluhur maka pelaksanaannya harus dilakukan secara internal dalam hubungan keluarga dan perorangan.

Peraturan ini dikeluarkan pada 6 Desember 1967 mengenai Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat masyarakat Cina di Indonesia. Isi peraturan seperti yang tertulis diatas bertujuan untuk membatasi aktifitas yang berkaitan dengan keagamaan, Kepercayaan dan Adat Istiadat masyarakat Tionghoa. Hal ini ditujukan sebagai upaya pemerintah melakukan pemabauran atau asimilasi secara total terhadap masyarakat Tionghoa dapat terwujud. Aktifitas yang berhubungan dengan agama, kepercayaan, serta adat istiadat masyarakat Tionghoa hanya boleh dirayakan dirumah dengan keluarga masing – masing atau secara perorangan. Mereka dilarang mempertontonkan atau mengadakan aktifitas tersebut di muka umum.

- c. Surat Edaran Menteri Penerangan No.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988

Peraturan ini berisi tentang pelarangan penerbitan dan percetakan tulisan/iklan beraksara dan berbahasa China / mandarin. Surat edaran ini dikeluarkan pemerintah karena ketakutan pemerintah bahwa etnis Tionghoa akan membangun suatu komunitas tersendiri dan akan melakukan suatu pemberontakan menggulingkan kekuasaan pemerintahan Soeharto. Hal tersebut terbukti ketika etnis Tionghoa melakukan banding terhadap peraturan ini yang akhirnya etnis Tionghoa diperbolehkan dengan catatan mereka berjanji agar tidak menghimpun kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan.<sup>13</sup>

- d. Kerjasama Bisnis

Dalam buku Etnis Cina dijelaskan bahwa Dr. Leo menguraikan, kedudukan ekonomi orang Cina berawal dari kebijakan orde lama dengan sistem benteng yang memunculkan pengusaha Ali-Baba. Lalu pada masa Orde Baru muncul sistem “ cukong “ yaitu seorang pedagang Cina yang bekerjasama dengan elite pengusaha.

Kemudian pada masa Orde Baru itu juga berturut-turut dikeluarkan berbagai peraturan – peraturan dan Kepres – kepres yang intinya ingin memajukan dan menguntungkan pengusaha pribumi. Namun, peraturan –

peraturan tersebut tidak lagi menjadi efektif manakalah pengusaha- pengusaha pribumi mulai menjalin mitra dengan pengusaha non-pribumi. Yang kemudian melahirkan kenyataan bahwa hanya sedikit dari pengusaha pri bumi yang diuntungkan peraturan tersebut.

- e. Peraturan Pangdam Brawijaya Mayjen Soemitro

Pada masa Orde Baru posisi Angkatan Darat semakin kuat sehingga menimbulkan kecenderungan penguasa – penguasa militer di daerah – daerah untuk menentukan kebijakan sendiri – sendiri. pada 31 Desember 1966 Mayjen Soemitro selaku Papelrada Jawa Timur dan Madura mengeluarkan empat keputusan yang ditujukan kepada orang Tionghoa dan stateless.<sup>14</sup>Empat keputusan tersebut antara lain :

1. Keputusan yang pertama yakni melarang orang – orang Tionghoa WNA/stateless untuk melakukan kegiatan perdagangan besar di kota – kota lain di daerah Jawa Timur kecuali Surabaya.
2. Keputusan yang kedua, melarang orang – orang Tionghoa WNA/ stateless pindah domisili keluar dari daerah Jawa Timur.
3. Keputusan ketiga, Papeldara Jawa Timur mengenakan pajak sebesar Rp. 2. 500 per jiwa kepada seluruh masyarakat Tionghoa yang berada di daerah Jawa Timur.
4. Keputusan keempat, melarang penggunaan huruf dan bahasa Tionghoa di muka umum demikian juga dalam hal pembukuan, perdagangan, korespondensi, percakapan telepon serta perdagangan.<sup>15</sup>

### 3) Dampak kebijakan – kebijakan Pemerintah Orde baru terhadap masyarakat Tionghoa Surabaya

Kebijakan – kebijakan yang diterapkan pemerintah orde baru di atas memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Tionghoa khususnya di Surabaya.

#### a. Dampak Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966

Peraturan penggantian nama memiliki dampak yang cukup menyulitkan di kota Surabaya. Dampak tersebut dirasakan oleh orang Tionghoa yang bersedia mengganti nama dan orang Tionghoa yang tidak bersedia mengganti namanya. Hal tersebut diungkapkan pak Bingky, bahwa jika orang Tionghoa tidak bersedia mengganti namanya maka ia akan mengalami kesulitan dalam pekerjaan mereka. Pak Katjo yang belum mengganti nama juga mengalami kesulitan, dimana pasportnya tidak dapat digunakan. Sementara pak Liem tidak melakukan ganti nama dikarenakan untuk melakukan proses ganti nama memerlukan biaya yang besar.<sup>16</sup>

#### b. Dampak Instruksi Presiden No.14/1967 mengenai Agama, Kepercayaan, dan Adat istiadat Masyarakat Cina di Indonesia

<sup>14</sup>Benny G.2008. “ Tionghoa dalam Pusaran Politik “ Jakarta : Trans media. hml. 966

<sup>15</sup>Ibid . hml 966 - 967

<sup>16</sup>Laylatul Fitrya, Jurnal Avatara “ Tionghoa dalam Diskriminasi Orde Baru Tahun 1967 – 2000 ”

Kebijakan ini memiliki dampak yang besar mengenai pembatasan kebudayaan masyarakat Tionghoa. Dimana mereka tidak lagi bisa merayakan Tahun Baru Imlek, Capgomeh lomba perahu naga hingga tarian Barongsai yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Dengan kebijakan ini otomatis semua kegiatan tersebut mati. Kebijakan ini juga berdampak pada agama Konghucu. Pemerintah Orde Baru sangat ahli dalam mengendalikan orang – orang Tionghoa. Walaupun jumlah mereka kurang lebih hanya 3 persen dari keseluruhan namun mereka memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian pemerintahan Indonesia

Dalam hal KTP pemeluk agama Konghucu dihadapkan pada masalah kode dan pengisian agama dimana seringkali KTP mereka diberi kode “ T “ yang maknanya mereka diperlakukan sama dengan mantan tahanan politik yang secara khusus tahanan politik dalam KTP nya terdapat tanda “ ET” atau ex Tahanan Politik. Sementara dalam hal pengisian agama dalam KTP juga terdapat masalah dimana hanya tersedia lima agama sehingga hal ini menyebabkan ada sebagian dari mereka yang terpaksa menulis agama lain seperti Budha, Kristen, atau Islam.

#### c. Dampak Surat Edaran Menteri Penerangan No.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988

Dampak dari peraturan ini adalah pelarangan terhadap bahasa mandarin yang merupakan bahasa yang sering digunakan oleh orang – orang Tionghoa walaupun bahasa mandarin merupakan bahasa internasional yang diakui oleh PBB. Dampak lainnya yakni dilarangnya sekolah – sekolah menengah Tionghoa untuk beroperasi karena tidak adanya ijin dari pemerintah sehingga etnis Tionghoa harus bersekolah di sekolah – sekolah nasional yang didirikan pemerintah.

Dampak lain dari peraturan ini terdapat pada media massa berbahasa Tionghoa yang dilarang oleh pemerintah. Hanya ada satu media massa yang diijinkan oleh pemerintah yakni surat kabar Suara Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dengan bahasa Indonesia. Surat kabar ini merupakan surat kabar yang dikelola dan diawasi oleh militer yang dalam hal ini adalah ABRI, meskipun demikian masih ada orang – orang Tionghoa yang dianggap bersih yang dipekerjakan disana.

#### d. Keputusan Pangdam Brawijaya Mayjen Soemitro

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pangdam Brawijaya Mayjen Soemitro itu menimbulkan reaksi yang sangat hebat baik dikalangan Tionghoa maupun pribumi yang juga banyak dari kalangan tersebut tidak menyetujui peraturan tersebut. Drs. Moh. Hatta yang merupakan mantan wakil Presiden RI dengan tegas mengatakan, bahwa peraturan penguasa perang itu mengacaukan perekonomian nasional, hal itu terjadi karena peraturan tersebut telah menimbulkan kekosongan di bidang peredaran barang di suatu daerah yang kemudian berdampak pada daerah yang lainnya. Persepsi dalam konteks antar kelompok

### Muslim Tionghoa Masa Orde Baru di Surabaya

Jackson and smith memaknai persepsi dalam konteks antar kelompok sebagai upaya mengidentifikasi diri terhadap suatu kelompok agar status dan gengsi yang dimiliki oleh kelompok tersebut akan mempengaruhi persepsi setiap individu yang ada di dalamnya. Pada masyarakat Tionghoa di Indonesia terdiri dari berbagai macam masyarakat Tionghoa, mulai dari Tionghoa benteng, Tionghoa batak, Tionghoa jawa serta Tionghoa lainnya yang penamaannya mengacu pada di daerah mana mereka tinggal. Selain penamaan berdasarkan daerah dimana mereka tinggal, ada juga penamaan sesuai dengan agama yang mereka anut. Masyarakat Tionghoa yang beragama Islam mulai mengidentifikasi diri mereka sebagai suatu kelompok Tionghoa yang berbeda. Mereka mulai membentuk kelompok tersendiri yang diberi nama Muslim Tionghoa. Kelompok ini kemudian akan mempengaruhi persepsi masyarakat luas terhadap masyarakat Tionghoa yang identik dengan agama Konghucu atau kristen serta sangat membenci Islam.

#### 1. Muslim Tionghoa

Istilah Muslim Tionghoa bukanlah untuk mengkotak – kotakkan umat muslim di Indonesia, tetapi semata – mata sebagai ungkapan turut bangga dan berbahagia bahwa kita mendapatkan saudara se-iman dari golongan Tionghoa yang tadinya jauh dari Islam. Dikatakan oleh bapak Kakanwil Departemen Agama Jawa Tengah pada berita pers April 1985 bahwa Muslim Tionghoa sebetulnya sekedar sebutan nama kesayangan umat Islam Indonesia kepada saudara – saudara barunya yang se-agama yang kebetulan berasal dari golongan Tionghoa.<sup>17</sup>

##### A. Daya tarik in Group

Dalam teori yang dikemukakan oleh Jackson and Smith in group diartikan sebagai sebuah kelompok dimana anggotanya mempunyai ras memiliki kelompok tersebut. In group memiliki kecenderungan selalu menganggap kelompoknya baik sehingga menimbulkan sikap diskriminasi dalam perlakuan yang lebih baik atau lebih menguntungkan in group atas out group. Pada masalah Masyarakat Tionghoa, Muslim Tionghoa yang merasa mendapatkan dukungan dari pemerintah serta dekat dengan masyarakat pribumi mulai menampakkan keunggulan – keunggulan mereka kepada masyarakat Tionghoa non Muslim dengan harapan mereka bersedia menjadi Muslim.

##### a. Islamisasi Masyarakat Tionghoa di Indonesia

Istilah Islamisasi secara sederhana diartikan sebagai pengislaman. Islamisasi dapat juga diartikan sebagai pembebasan manusia dari penghambaan apapun selain kepada Allah.<sup>18</sup> Islamisasi dikalangan Tionghoa bukan merupakan suatu hal yang baru. Di daerah masyarakat Tionghoa negara Cina. Islam sudah masuk dan menyebar terlebih dahulu ke China sebelum kemudian masuk ke Indonesia. Salah satu tokoh China muslim yang paling

<sup>17</sup>Yunus Yahya. 1985. “Muslim Tionghoa Kumpulan Karangan”. Jakarta: Yayasan Ukhuwa Islamiyah. hlm. 20

<sup>18</sup>Islamisasi-Ilmu-DN-.pdf hal. 1

terkenal yakni Cheng ho, panglima Angkatan Laut dinasti Ming ini berlayar ke beberapa negara termasuk Indonesia.

b. Islamisasi sebagai sarana pembauran Tionghoa di Indonesia

Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sehingga pemerintah melihat bahwa dengan masyarakat Tionghoa menjadi seorang muslim ini akan mempermudah proses pembauran. Kebijakan Islamisasi memang bukan kebijakan yang benar - benar dipaksakan oleh pemerintah seperti kebijakan penggantian nama dari Tionghoa ke nama Indonesia. Namun banyak menilai bahwa proses Islamisasi yang terjadi pada masa orde baru mempercepat terjadinya pembauran. Banyak masyarakat Tionghoa yang secara berbondong-bondong memeluk agama Islam. Hal ini sungguh membanggakan pemerintah sebagai perintis konsepsi pembauran.

a. Tokoh Islamisasi Tionghoa masa Orde Baru

1. H. Abdul Karim Oey

Abdul Karim Oey atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Abdul Karim Oey Tjeng Hien, adalah tokoh muslim Tionghoa yang aktif pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua. Abdul Karim Oey pernah menjabat sebagai ketua Muhammadiyah cabang Bengkulu. selain itu ia juga mendirikan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan sangat giat dalam menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat Tionghoa.<sup>19</sup>

2. Junus Jahja

Junus Jahja alias Lauw Chuan Tho, lahir di Jakarta tahun 1927, merupakan seorang sarjana ekonom dari Rotterdam University. Junus Jahja sangat aktif dalam pergerakan pembauran, Ia adalah salah satu pimpinan LPKB dan Bakom -PKB. Tahun 1979 Ia menjadi seorang muallaf. Pada periode tahun 1979 – 1982, Junus Jahja pernah mematok target bahwa ia akan merangkul 100.00 masyarakat keturunan Tionghoa. Ia optimis bisa mengislamkan 10% dari mereka yakni 1000 orang Tionghoa, kemudian dari 1.000 muslim Tionghoa tersebut diharapkan 10% akan menjadi intinya.

3. Bambang Sujanto

H. Moh. Yusuf Bambang Sujanto memiliki nama Tionghoa Lioe Ming Yen, pria kelahiran Surabaya, 13 Oktober 1947 merupakan ketua DPW PITI Jawa Timur pertama dari tahun 1988 – 1991. Sebelum masuk Islam, pak Bambang merupakan orang yang sangat nakal, sehingga suatu saat pernah hampir dibunuh orang dan yang menyelamatkannya adalah orang Islam. Pak Bambang masuk Islam tahun 1980 saat berumur 33 di masjid Al Falah oleh almarhum KH. Muttaqin.

4. Ust Syaukani Ong

Syaukani Ong merupakan dai kelahiran Kalimantan Timur pada 1 November 1958. Pada waktu kelas tiga SMA dia berpindah keyakinan dari Konghuchu menjadi seorang muslim. Adapun keputusannya menjadi seorang

muallaf didasari oleh keinginannya sendiri serta mendapat hidayah dari Allah.

Meski beliau dilahirkan sebagai non muslim namun beliau merupakan salah satu pendiri yayasan masjid Muhammad Cheng Ho. Selain itu beliau juga salah satu pendiri PITI Surabaya. Keaktifannya pada organisasi tersebut dikarenakan minimnya dai-dai yang berdakwah dikalangan masyarakat Tionghoa.

b. Upaya – upaya Islamisasi Tionghoa masa Orde Baru

Demi mensukseskan Islamisasi yang digagas, hilang dan memunculkan ketertarikan masyarakat Tionghoa agar mau belajar agama Islam. Berbagai pendekatan dilakukan baik secara personal, kelompok maupun melalui lembaga – lembaga yang telah ada. Dalam hal ini ada beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

1. Pertemuan di hari Raya Islam

Yayasan Ukhuwah Islamiyah memiliki berbagai cara dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Tionghoa salah satunya dengan mengadakan pertemuan dan silaturahmi antara kaum muslimin dan masyarakat Tionghoa.

2. Pengangkatan anak

Kegiatan pertemuan yang terjadi di Hari Raya antara kaum muslimin dengan masyarakat Tionghoa memiliki dampak yang besar selain karena ada banyak masyarakat Tionghoa yang masuk Islam juga akhirnya pertemuan ini melahirkan suatu gagasan baru untuk lebih mengenalkan Islam kepada masyarakat Tionghoa. Gagasan tersebut yakni gagasan pengangkatan anak, dalam hal ini pemuda – pemudi keturunan Tionghoa yang telah menjadi seorang muslim dititipkan kepada keluarga – keluarga muslim semacam “ anak angkat “ dalam keluarga tersebut.

3. Majelis Taklim Pembauran

Selain dua upaya tersebut Yayasan Ukhuwah Islamiyah juga membuat sebuah majelis taklim dalam rangka mempercepat proses pembauran masyarakat Tionghoa melalui cara mendirikan majlis Taklim yang diberi nama Majelis Taklim Pembauran. Majelis Taklim ini merupakan Majelis Taklim yang dilaksanakan satu bulan sekali di tempat kediaman seorang keturunan Tionghoa.

4. Melakukan pendekatan dengan pengurus masjid di Surabaya

Dalam rangka menyukseskan dakwah PITI, para pengurus melakukan pendekatan kepada para pengurus masjid Rahman di kampung Kuning dan masjid Al Falah di Surabaya. Sehingga di ke dua masjid tersebut sering kali terdengar berita mengenai pelaksanaan ikrar masuk Islam terutama dari kalangan masyarakat Tionghoa.

5. Mengadakan acara halal bi halal

Pada masa kepengurusan DPC PITI Surabaya periode 1991 – 1992 yang diketuai oleh Abdurrachman Tjin, PITI melakukan kegiatan halal bi halal yang dilaksanakan di salah satu mall di kota Surabaya yakni Andhika Plasa pada tahun 1992.

6. Khutbah jum'at dan pengajian rutin

<sup>19</sup> Leo Suryadinata.1990. “ Mencari Identitas Nasional dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien ”. Jakarta. LP3ES. hlm. 173

Langkah lainnya yang digunakan oleh para pengurus PITI adalah dengan melakukan pembinaan keislaman melalui khutbah jum'at dan pengajian rutin. Khutbah jum'at merupakan hal yang harus ada dalam pelaksanaan sholat jum'at. Diharapkan dengan mendengarkan khutbah jum'at akan menambah wawasan mereka tentang Islam.

#### 7. Isra' mi'raj

DPW PITI Jawa Timur juga mengadakan acara Isra' mi'raj yang dilaksanakan di Pasar Atom Surabaya dan dihadiri tidak kurang oleh 300 peserta. Pada acara Isra' mi'roj tersebut diundang Ust. Syaukani Ong dan H. Drs. Turhan Badri sebagai penceramahnya.

#### c. Kendala yang dihadapi dalam proses dakwah pada kalangan masyarakat Tionghoa

Beberapa kendala etnis Tionghoa menjadi seorang muslim

##### 1. Kendala psikologis

Orang Tionghoa jika menjadi seorang muallaf mengalami goncangan dalam psikologisnya. Ada banyak kegiatan yang sudah menjadi budaya mereka yang kemudian ketika mereka memeluk Islam kegiatan tersebut tidak diperbolehkan lagi mereka kerjakan.

##### 2. Kendala sosiologis

Kendala dalam hal sosiologis bisa datang dari orang Tionghoa sendiri maupun masyarakat Indonesia. Mayoritas orang Tionghoa tidak senang dengan orang Tionghoa yang beragama Islam walaupun orang tersebut merupakan kerabat mereka sendiri.

##### 3. Kendala fisik

Apabila orang Tionghoa masuk Islam ada banyak sekali aturan yang ditaati serta kewajiban yang harus mereka kerjakan. Mereka tidak boleh makan babi, harus dikhitan, menjalankan sholat lima waktu, menjalankan ibadah puasa yang bisa saja mereka digoda orang – orang Tionghoa yang non muslim sehingga akan semakin berat puasa mereka, serta membayar zakat yang bagi mereka cukup sulit.

##### 4. Kendala ekonomis

Stereotip orang Tionghoa sebagai kelompok kaya semakin merugikan mereka karena di kalangan mayoritas masyarakat Indonesia berkembang persepsi masyarakat Tionghoa yang suka memonopoli perdagangan. Sehingga timbul sikap diskriminasi terhadap etnis Tionghoa.

### Muslim Tionghoa sebagai Identitas

#### A. Keyakinan saling terkait

Jackson and Smith mengartikan pola keyakinan yang terkait sebagai sebuah kelekatan emosional terhadap kelompok yang melahirkan suatu hubungan yang terkait. Untuk menciptakan kelekatan emosional ini dibutuhkan sebuah wadah atau organisasi untuk melahirkan sebuah hubungan yang terkait.

Sikap keterkaitan antar kelompok yang kemudian menjadi suatu keinginan untuk membangun suatu kerukunan dan solidaritas antar sesama menjadikan masyarakat muslim Tionghoa membentuk suatu wadah atau organisasi – organisasi yang menunjang keberadaan mereka.

Ada beberapa organisasi yang mendukung Islamisasi masyarakat Tionghoa di Indonesia baik itu organisasi Islam atau nasional. Diantaranya,

##### a. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI)

Sejarah awal mula berdirinya PITI adalah ketika di tahun 1963 Oey di datangi ketua Persatuan Tionghoa Muslim, Kho Goan Tjin, yang mengusulkan kepadanya agar PIT dan PTM digabung dijadikan satu. Oey sendiri merupakan salah satu pendiri dan ketua pertama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI).

Pada masa Orde Baru PITI tepatnya di akhir tahun 1972 PITI dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk organisasi baru yang masih bernama PITI. Namun bedanya terletak pada kepanjangan dari nama itu. Jika sebelum dibubarkan PITI merupakan kepanjangan dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. maka sekarang berganti menjadi Pembina Iman Tauhid Islam.

##### b. PITI cabang Surabaya

Berdirinya PITI cabang Surabaya tidak bisa lepas dari dewan pimpinan wilayah PITI Jawa Timur. Kepengurusan dewan pimpinan wilayah telah disahkan oleh dewan pimpinan pusat di Jakarta pada tanggal 9 maret 1988 dengan nomer SK 5/SK/DPP/III/1988 dengan ketua Bapak H. Moh. Yusuf Bambang Sujanto masa jabatan 1988 – 1991.

Langkah awal yang dilakukan pengurus adalah mendata para Muslim Tionghoa yang ada di wilayah Surabaya. Para pengurus juga mencoba melakukan pendekatan kepada pengurus masjid Rahman di kampung kuning dan masjid Al Falah di Surabaya. Pendekatan yang dilakukan kepada kedua pengurus masjid ini bisa dibilang sukses, karena seringkali terdengar berita adanya warga yang masuk Islam terutama dari golongan masyarakat Tionghoa.

##### c. Yayasan H. Karim Oey / Masjid Lautze

Yayasan H. Karim Oey/ masjid Lautze yang berada di jalan Lautze, pasar baru Jakarta pusat dahulunya merupakan sebuah ruko berlantai empat yang kemudian disewa untuk dijadikan masjid. Sejarah masjid ini berawal dari berawal dari tokoh – tokoh yang berasal dari ormas – ormas Islam NU, Muhammadiyah, Al- Wasliyah, Kahmi, dan Haji Karim Oey membuat yayasan yang diberi nama yayasan Oei Tjeng Hien yang kemudian dikenal dengan nama yayasan H. Karim Oey yang bertujuan memberikan informasi kepada para orang – orang Tionghoa Indonesia yang menjadi muslim. Yayasan H. Karim Oey didirikan untuk mengenang jasa – jasa almarhum H. Karim Oei Tjeng Hien (1905 – 1988). Yayasan ini diresmikan oleh mantan presiden B.J. Habibie pada tahun 1994.

##### d. Yayasan Ukhuwah Islamiyah

Yayasan ukhuwah Islamiyah didirikan pada 16 oktober 1981, tujuan dari yayasan ini adalah untuk melaksanakan dakwah Islamiyah dikalangan intelektual, wiraswasta, dan angkatan muda. Junus Yahya pendiri yayasan ini percaya jika tiga golongan ini sudah masuk Islam maka orang – orang lain akan mengikutinya masuk Islam. Yayasan ini didirikan oleh Junus Yahya bernama Drs. H. Khozin Arief, Drs. M. Bidiyatna, Hambas, dan H. Sudrajat Brotokuntoro. Pendirinya terdiri dari 2 non pri

dan 3 pri. Meskipun baru didirikan namun banyak kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan menarik banyak orang untuk mengikutinya.

#### A. Depersonalisasi

Faktor terakhir yang menjadi penunjang identitas sosial adalah depersonalisasi. Menurut Jackson and Smit, depersonalisasi berarti suatu sikap individu, dimana individu tersebut akan mengurangi nilai – nilai yang ada pada dirinya agar mereka bisa diterima oleh kelompoknya

##### 1. Pengaruh menjadi Muslim Tionghoa terhadap kehidupan mereka

Berpindah keyakinan menjadi seorang muslim membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan orang – orang Tionghoa. Masyarakat umum Tionghoa yang sangat anti dengan Islam dan menganggap agama Islam sebagai agama rendah menjadi tantangan tersendiri bagi orang – orang Tionghoa yang memilih menjadi muslim. Ada banyak sekali perubahan yang terjadi di kehidupan orang – orang Tionghoa yang menjadi muslim.

##### a. Individu

Memilih menjadi seorang muallaf merupakan sebuah pilihan yang diambil oleh sedikit masyarakat Tionghoa di Indonesia. Ada beberapa alasan yang mendasari orang – orang Tionghoa tersebut memilih menjadi seorang muallaf mulai dari mendapatkan hidayah hingga peristiwa – peristiwa yang dialami sehingga membuatnya tertarik dan berkeinginan menjadi muslim

##### b. Keluarga

Keluarga merupakan orang terdekat dalam hidup kita, dukungan serta semangat dalam keluarga merupakan bagian terpenting ketika kita mengambil sebuah pilihan yang sulit. Bagi masyarakat Tionghoa, menjadi muslim merupakan suatu pilihan yang sulit karena hal tersebut berkaitan dengan hubungan mereka dengan keluarga.

##### c. Masyarakat

Ada banyak sekali tanggapan masyarakat luas baik itu muslim Indonesia maupun orang – orang Tionghoa secara umum ketika melihat orang Tionghoa memutuskan menjadi seorang muslim. Bagi orang – orang Indonesia melihat seorang Tionghoa menjadi muslim merupakan hal yang sedikit aneh karena banyak yang berpikir bahwa Tionghoa selalu identik dengan agama budha, konghuchu dan kristen dan menjadi suatu hal yang sangat tabu ketika ada orang Tionghoa yang menjadi muslim.

##### 2. Muslim Tionghoa sebagai identitas

Ketika individu telah masuk menjadi anggota suatu kelompok maka individu tersebut harus mengikuti semua aturan yang ada dalam kelompok tersebut. Selain itu individu tersebut harus bersedia mengurangi nilai – nilai yang ada pada dirinya sesuai dengan nilai – nilai yang ada pada kelompok tersebut.

Identitas mereka menjadi Muslim Tionghoa membawa dampak yang besar bagi kehidupan mereka di Indonesia. Melalui identitas mereka sebagai Muslim Tionghoa mereka telah merubah pandangan masyarakat Indonesia tentang orang Tionghoa bahwa orang Tionghoa juga bisa masuk Islam walaupun masih ada

rasa benci terhadap mereka sebagai akibat sistem yang dibuat Belanda. Namun setidaknya identitas mereka sebagai seorang Muslim Tionghoa mampu mendekatkan mereka dengan masyarakat pribumi.

## PENUTUP

### Simpulan

Etnis Tionghoa merupakan kelompok etnis minoritas di Indonesia. Sebagai etnis minoritas, Tionghoa seringkali mendapatkan perlakuan bersifat diskriminasi. Berbagai diskriminasi sering diterima oleh orang – orang Tionghoa.

Berbagai diskriminasi tersebut membuat beberapa orang Tionghoa memberikan sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut melalui Asimilasi dengan cara mengikuti agama mayoritas masyarakat Indonesia yaitu agama Islam. Islamisasi Tionghoa atau mengislamkan orang – orang Tionghoa merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh beberapa orang Tionghoa yang sudah masuk Islam seperti Bapak Karim Oey, Junus Yahya, serta Bambang Sujanto dan Syauckani Ong yang lebih khus berdakwa di Surabaya dan sekitarnya.

Islamisasi orang – orang Tionghoa dilakukan dengan berbagai seperti mengadakan silaturahmi dengan orang – orang Tionghoa non muslim untuk mengenalkan mereka terhadap Islam. proses Islamisasi ini juga dilakukan dengan mendirikan berbagai wadah atau organisasi seperti PITI, Yayasan Pembauran, Yayasan Karim Oey. Islamisasi mengalami berbagai masalah mulai dari masalah ekonomi, sosioal, hingga psikologis. Rasa benci dan anggapan bahwa Islam adalah agama rendah menjadi masalah yang utama.

Dengan menjadi seorang Muslim, orang Tionghoa akan lebih dekat dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan pemeluk agama Islam. selain itu, hal tersebut akan menghapus stigma negatif bahwa orang Tionghoa membenci Islam serta memunculkan stigma positif bahwa orang Tionghoa juga bisa masuk Islam. menjadi seorang Muslim akan membantu Identitas tersendiri bahwa orang – orang Tionghoa sebagai Muslim Tionghoa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press. Hlm 10
- Noordjanah, Andjarwati. 2004. “ *KOMUNITAS TIONGHOA DI SURABAYA (1900-1946)* “, Semarang : Mesiass, hlm 7.
- Benny G. 2008. “ *Tionghoa dalam Pusaran Politik* “ Jakarta : Trans media. hml. 966
- Suryadinata, Leo. 2005. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900 – 2002*. Jakarta: LP3ES Hlm : 249.
1982. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: PT. Grafiti Press. Hlm 135
1990. “ *Mencari Identitas Nasional dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien* “. Jakarta. LP3ES. hlm. 173

Yahya, Yunus. 1985. "*Muslim Tionghoa Kumpulan Karangan*". Jakarta: Yayasan Ukhuwa Islamiyah. hlm. 20

**Jurnal**

<http://etheses.uin>

malang.ac.id/2620/5/09410051\_Bab\_2.pdf

Laylatul Fitrya, Jurnal Avatara "*Tionghoa dalam Diskriminasi Orde Baru Tahun 1967 – 2000*

Suryadinata, Leo.2003. Jurnal UI.ac.id." *Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?*

Islamisasi-Ilmu-DN-.pdf hal. 1

Wibowo, Priyanto."TIONGHOA DALAM

KEBERAGAMAN INDONESIA: SEBUAH PERSPEKTIF HISTORIS TENTANG POSISI DAN IDENTITAS "Proseding the 4<sup>th</sup> Internasional Conference of Indonesia Studies : " Unity, Defersity, and Future" Hal. 644

